

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Isnaini, F. (2020). Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI)*, 24-29.
<https://jim.teknokrat.ac.id/index.php/teknologiinformasi/article/view/559>
- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26* (pp. 38-43). Jakarta Selatan: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_20240108.pdf
- Compas.com, 2022, 23 Mei. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli. Online. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/01100081/pengertian-pajak-menurut-ahli> (30 Maret 2023).
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. . *Jurnal Bisnis Kolega*, 55-63.
<https://www.pmci.ac.id/ejournal/index.php/jbk/article/view/20>
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Berdasarkan PER 16/PJ/2016 dan PP No 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ESENSI Jurnal Manajemen Bisnis*, 137-143.
<https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/843>
- Hendra, Yudi, Awan, Wilianto, & Simanihuruk, T. (2024). Model Spreadsheet Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Jurnal Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/pubarama/article/download/12/9>
- Hutabarat, M. I., Loo, P., Sitompul, S., & Firmansyah, E. (2022). Mudah Memahami Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Mara Anugerah Mas. *Medani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 92-97.
<https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jpm/article/view/162>
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 1057-1068.
<http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpens/article/view/244>

Ningsih, S. S., Meliani, R., Aminah, A., Widyowati, L. A., & Agustina, Y. (2022). Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 (Pada Sekolah TK ABA'Aisyiyah PCA Ciputat Timur Tangerang Selatan). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu*, 15-21.

<https://jurnal.itscience.org/index.php/jpmasdi/article/view/3394>

Wardany, Y., Suhendro, D., & Purba, F. A. (2019). Sistem Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Pada PT. Perkebunan Nusantara III Sei Mangkei Kabupaten Simalungun. *TECHSI-Jurnal Tekni Informatika*, 166-178.

<https://ojs.unimal.ac.id/techsi/article/view/1403>

LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

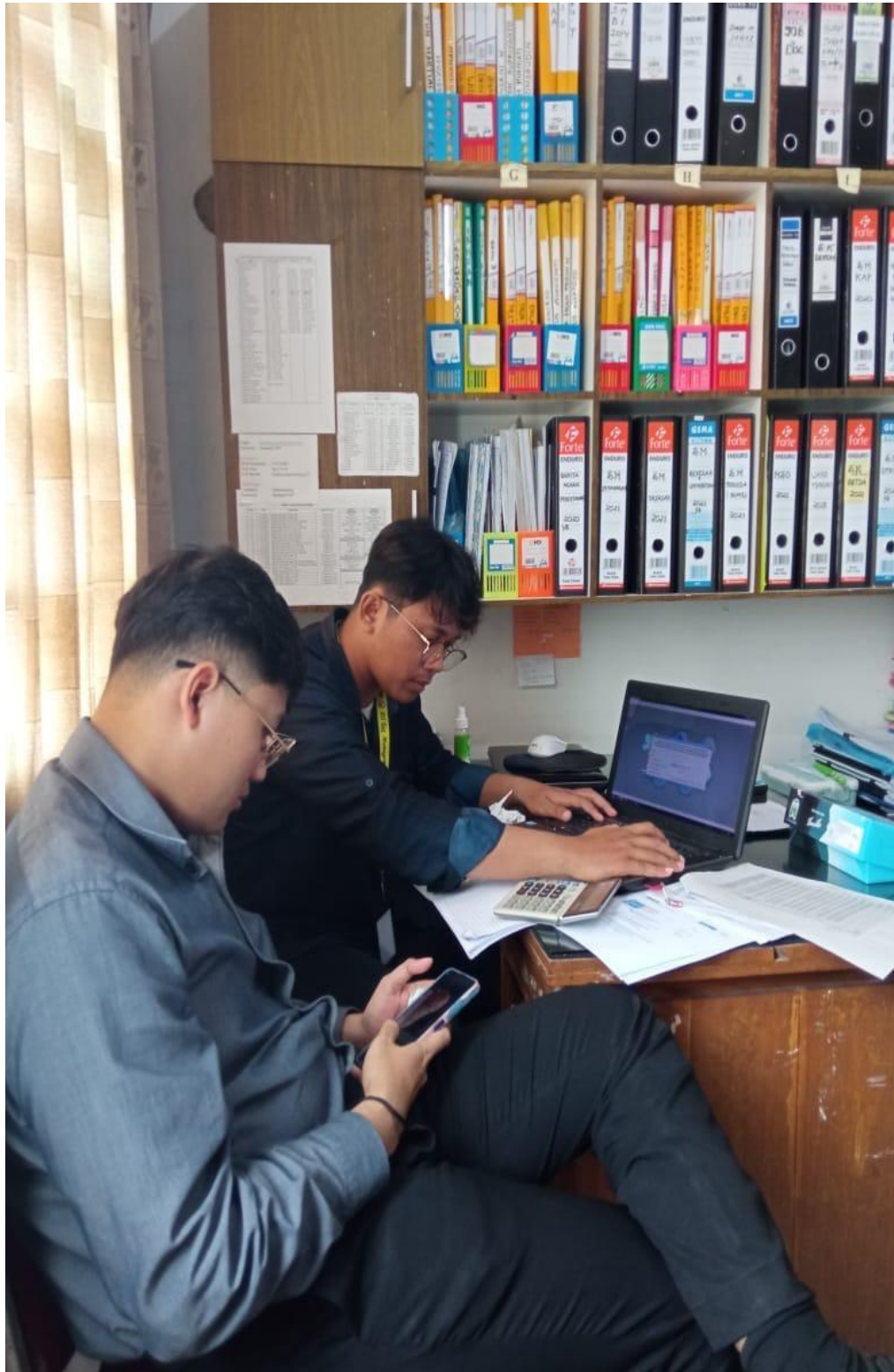
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- c. bahwa . . .


SK No 190022 A

2. Kegiatan Magang di PT BPR Bank Pemasang



3. E BUPOT Tuan THS

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN**

FORMULIR 1721 - VIII
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 150424000057 Masa Pajak - Tahun Pajak : 04 - 2024


A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : _____	2. NIK : _____
3. NAMA : _____	
4. ALAMAT : Jl. _____	

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-01	24.135.000	24.135.000	<input type="checkbox"/>	9	2.172.150

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :**D. IDENTITAS PEMOTONG**


1. NPWP : 42.637.878.2-502.000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK	 2KDPIZTZ
3. NAMA PENANDATANGAN : _____	

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

- | | |
|--------------|--|
| 1. 21-100-01 | Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap |
| 2. 21-100-02 | Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala |

4. E BUPOT Nyonya NJS

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN**

FORMULIR 1721 - VIII
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 1504240000058 Masa Pajak . Tahun Pajak : 04 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG


1. NPWP : _____	2. NIK : _____
3. NAMA : _____	
4. ALAMAT : _____	

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-01	19.308.000	19.308.000	<input type="checkbox"/>	8	1.544.640

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :


D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 42.637.878.2-502.000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK	 XCMWJHUV
3. NAMA PENANDATANGAN : _____	

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN	
1. 21-100-01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
2. 21-100-02	Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala

5. E BUPOT Tuan JH

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

Nomor : 1304240000038 Masa Pajak - Tahun Pajak : 04 - 2024

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG


1. NPWP : _____	2. NIK/NO.PASPOR : - _____
3. NAMA : _____	_____
4. ALAMAT : _____	_____
5. WAJIB PAJAK : <input type="checkbox"/> YA	6. KODE NEGARA DOMISILI : _____
LUAR NEGERI : <input type="checkbox"/>	

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-10	7.723.000	7.723.000	<input type="checkbox"/>	1	77.230

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 42.637.878.2-502.000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK	
3. NAMA PENANDATANGAN : _____	07/04/2024
	VC56WIOY


KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	
1. 21-100-03	Upah Pegawai Tidak Tetap
2. 21-100-04	Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
3. 21-100-05	Imbalan Kepada Agen Asuransi
4. 21-100-06	Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07	Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-09	Bukan Pegawai Lainnya
7. 21-100-10	Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur
8. 21-100-11	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
9. 21-100-12	Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
10. 21-100-13	Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
11. 21-100-99	Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26	
1. 27-100-99	Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

6. E BUPOT Tuan BS

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 130424000039 Masa Pajak - Tahun Pajak : 04 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG


1. NPWP : _____	2. NIK/NO.PASPOR : - _____
3. NAMA : _____	
4. ALAMAT : _____	
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : <input type="checkbox"/> YA	6. KODE NEGARA DOMISILI : _____

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-10	9.654.000	9.654.000	<input type="checkbox"/>	1,5	144.810

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 42.637.878.2-502.000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : _____	07/04/2024 
3. NAMA PENANDATANGAN: TRI HARY SUBEKTI	PO1GH2E6

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26	
PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	
1. 21-100-03	Upah Pegawai Tidak Tetap
2. 21-100-04	Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
3. 21-100-05	Imbalan Kepada Agen Asuransi
4. 21-100-06	Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07	Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-09	Bukan Pegawai Lainnya
7. 21-100-10	Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur
8. 21-100-11	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
9. 21-100-12	Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
10. 21-100-13	Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
11. 21-100-99	Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya
PPh PASAL 26	
1. 27-100-99	Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

7. Surat diterima Praktek lapangan Kerja (PKL)



Pemalang, 1 Desember 2023

Nomor : 154/B-PML/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan
Kullah Kerja Praktek

Kepada Yth :
Dekan Universitas Panca Sakti Tegal
Jl. Halmahera KM 1 Kota Tegal
Di TEGAL

Dengan hormat,

Mendasarkan surat dari Yayasan Universitas Panca Sakti Tegal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 065/K/A/FEB/UPS/XI/2023, tanggal 29 November 2023, perihal Ijin Melaksanakan Kuliah Kerja Praktek.

Bersama ini kami PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) siap menerima mahasiswa Kuliah Kerja Praktek sbb :

1. Nama : Dwiki Arief Hakam
2. NPM : 4221500006
3. Prodi : M. Perpajakan

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PEMALANG (Perseroda)

